



## Rekomendasi Lima Komisi untuk Gubernur

### Gambir, Warta Kota

Lima Komisi DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan acuan peningkatan kinerja Pemprov DKI Jakarta tahun 2022.

Rekomendasi itu diberikan setelah mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta tahun 2021.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, salah satu evaluasinya mendorong Pemprov melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) meningkatkan response time dalam menanggulangi kebakaran.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menempatkan pos siaga kebakaran di setiap keurahan.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dari 267 kelurahan di Ibukota hanya 108 kelurahan yang memiliki pos siaga kebakaran. Persoalan utama

dari lambatnya response time karena minimnya ketersediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran.

"Ini perlu segera diambil berbagai terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut," kata Mujiyono di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (18/4).

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail, meminta Pemprov DKI mengevaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya delapan organisasi perangkat daerah (OPD) dan 23 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hanya mampu menyerap 85,38 persen atau 7,2 triliun dari total Rp 8,4 triliun anggaran melalui penyerahan modal daerah (PMD).

Dengan demikian, komisi bidang perekonomian tersebut mendorong agar seluruh SKPD dan BUMD mitra melaporkan hasil rencana kerja secara berkala secara komperhensif. Kata Ismail, penyerapan anggaran tahun 2022 direkomendasikan

agar semua SKPD diharapkan telah menyelesaikan perencanaan kegiatan dengan matang dan terperinci selambat-lambatnya triwulan II.

"Harapannya bisa terealisasi maksimal dengan target 98 persen," ucap Ismail.

Kemudian Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi merekomendasikan agar Pemprov DKI menjual sejumlah saham BUMD yang dinilai tidak menguntungkan, karena tidak pernah berkontribusi memberikan deviden kepada DKI.

"Merekomendasikan kepada Gubernur untuk menjual saham milik Pemprov DKI Jakarta seperti PT Cemani Toka dengan kepemilikan Saham sebesar 26,85 persen dan PT Jakarta Internasional Expo Kemayoran dengan catatan dananya dipergunakan untuk membiayai program kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi warga Ibu Kota Jakarta," kata Rasyidi.

Lalu Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan ketersediaan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) saat membangun rumah susun (rusun). Hal ini sesuai yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 93 tahun 2021 tentang zona bebas air tanah.

"Perlunya koordinasi yang insentif antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan PDAM dan Kementerian PUPR terkait jaringan pipanisasi air bersih pada lokasi yang akan dibangun Rusunawa," kata Nova.

Terakhir, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam salah satu catatannya merekomendasikan, agar seluruh kelurahan memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan mengevaluasi beban kerja Puskesmas dengan jumlah warga. (faf)